

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan serta dalam mendaya guna dan hasil guna, penyelenggaraan pemerintahan baik melalui administrator pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa, maka pemberian otonomi kepada kabupaten/kota yang nyata dan bertanggung jawab merupakan hal yang baik.

Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Otonomi daerah adalah sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan budaya berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokrasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Oleh karena itulah sebagai konsekuennya dikeluarkan ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan Serta Perimbangan

Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang sekarang menjadi UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang sekarang menjadi UU No. 33 tahun 2004.

Dengan adanya otonomi daerah inilah diharapkan pemerintah daerah mampu untuk mengelola keseluruhan aset daerahnya untuk digunakan sebaik mungkin, akuntabel dan bertanggung jawab serta disajikan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan indeks pembangunan manusianya.

Salah satu aspek yang sangat krusial dalam desentralisasi (otonomi daerah) adalah permasalahan kinerja keuangan. Secara konseptual, kinerja keuangan mensyaratkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan beban kewenangan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah pusat berkewajiban untuk menjamin sumber keuangan atas pendelegasian tugas dan wewenang dari pusat ke daerah. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki agar pemerintah daerah mampu

menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik (Halim, 2013:43).

Kini kinerja instansi pemerintah lebih banyak mendapatkan sorotan karena masyarakat sering memonitor setiap perencanaan pemerintah dalam satu periode. Masyarakat mulai mempertanyakan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Walaupun anggaran belanja pemerintah (*government expenditure*) semakin meningkat, nampaknya masyarakat belum puas atas kualitas barang dan jasa yang diberikan oleh instansi pemerintah (Suwandi, 2013:79).

Salah satu bentuk keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah meningkatnya kemandirian dan secara bertahap mengurangi ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat. Agustina (2013: 85) menyatakan tujuan dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menurut UU Nomor 32 tahun 2004 adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dengan tata pemerintahan yang berpusat pada rakyat merupakan pilihan yang harus ditempuh untuk menjamin keberlanjutan demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial.

Untuk mengukur kemampuan daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pemerintahannya dapat dilihat dengan mengetahui kinerja keuangan daerah. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2013:231).

Pengukuran terhadap kinerja keuangan sangatlah penting dalam mengukur kemandirian suatu daerah. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja keuangan suatu daerah dilakukan menggunakan analisis rasio keuangan diantaranya derajat desentralisasi, tingkat ketergantungan keuangan daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan efektivitas pajak daerah (Mahmudi, 2016:140).

Dalam Katalog Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah melalui penyediaan layanan publik yang baik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membawa dampak yang baik pula bagi tersedianya pelayanan publik. Dengan layanan publik yang baik diharapkan dapat meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Peningkatan aspek kehidupan masyarakat dalam hal ini digambarkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada tahun 2012 Menteri Keuangan Indonesia melaporkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran 2012 mencapai Rp. 99,24 triliun. Besarnya SILPA APBD menunjukkan buruknya kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Buruknya pengelolaan keuangan daerah semakin diperparah dengan adanya sikap buruk pemerintah dalam implementasi (realisasi) anggaran daerah (APBD). Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melaporkan, meskipun di tahun 2012 pengelolaan keuangan daerah semakin membaik, namun banyak pemerintah daerah kategori Tidak Wajar (TW) dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan anggaran

yang buruk berdampak luas pada pembangunan daerah termasuk tingginya angka kemiskinan dan buruknya sumber daya manusia Indonesia. Berdasarkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) masyarakat miskin Indonesia di tahun 2012 mencapai 29,13 jiwa. Angka kemiskinan tersebut tersebar diberbagai daerah. *United Nations Development Programme* mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menempati urutan ke-121 di seluruh dunia. IPM indonesia termasuk kategori menengah. Peringkat Indonesia tersebut setara dengan negara-negara di Karibia dan Afrika Selatan. Data normatif tersebut jauh lebih parah dari apa yang terjadi di lapangan. ”Buruknya pengelolaan keuangan daerah disebabkan kinerja buruk pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan anggaran sehingga APBD tidak dapat direalisasikan dengan baik terutama untuk menopang kesejahteraan masyarakat” ujar Salahudin kepada *Harian Neraca Ekonomi*, (6/5/2013).

Pencapaian tujuan pembangunan manusia bukanlah hal yang baru dan selalu ada penekanan pada pemenuhan tujuan tersebut, yaitu pemenuhan pendidikan universal, peningkatan kesehatan serta pemberantasan kemiskinan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Titik berat pembangunan nasional Indonesia sesungguhnya sudah menganut konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasi oleh *United Nation of Development Programme* (UNDP), yakni konsep pembangunan manusia seutuhnya yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun spiritual. Untuk meningkatkan IPM diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi.

Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan pembangunan. Dengan adanya pemerataan pembangunan, terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara, diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan Kesehatan. Korea Selatan sebagai contoh sukses, tetap konsisten melakukan dua hal tersebut. Sebaliknya Brazil mengalami kegagalan karena memiliki distribusi pendapatan yang timpang dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP, BPS, Bapennas, 2004).

Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah: pertama, banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. Kedua, banyak negara maju yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial, seperti: penyalahgunaan obat, AIDS, alkohol, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, beberapa negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan yang tinggi karena mampu menggunakan secara bijaksana semua sumber daya untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia. (UNDP, 1990).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Selama periode 2004 hingga 2009, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Tasikmalaya terus mengalami peningkatan kecuali tahun 2010 mengalami penurunan IPM yaitu menjadi 66,58% dikarenakan adanya kesenjangan nilai IPM. Kemudian capaian IPM Kota Tasikmalaya untuk tahun berikutnya sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Terakhir angka IPM Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan yaitu 72.03% pada tahun 2018 meningkat menjadi 72.84% point pada tahun 2019 (BPS Kota Tasikmalaya).

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu di Priangan Timur yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di Priangan Timur dengan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2010-2018 yaitu dengan indeks 69.27. Hal ini menunjukkan bahwa 69.27 penduduk dapat mengakses hasil pembangunan

dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya (BPS Kota Tasikmalaya).

Maka dari itu melihat dari fenomena tersebut penulis memilih meneliti Pemerintahan Kota Tasikmalaya karena untuk dapat membuktikan teori yang menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun studi empirik terdahulu yang mendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Eka Marisca Harliyani dan Haryadi (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jambi”. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Keserasian Belanja Langsung secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan Rasio Ketergantungan Keuangan, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM; Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, dan Rasio Keserasian Belanja Langsung secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM.
2. Desi Handayani dan Fera Sriyunanti (2016) melakukan penelitian dengan judul “Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota Di Sumatera Bagian Tengah”. Penelitian ini memiliki

keterbatasan data pada pemerintah daerah kabupaten kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap IPM.

3. Kartika Berliani (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas terhadap PAD, efisiensi keuangan daerah dan keserasian belanja daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka; Kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas terhadap PAD, efisiensi keuangan daerah dan keserasian belanja daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka; Kinerja keuangan berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka; Kinerja keuangan berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat di Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
4. Luh Dini Yasintha Dwiandari dan I Dewa Nyoman Badera (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan pada Belanja Daerah dan

Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya pada Indeks Pembangunan Manusia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah tidak berpengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Provinsi Bali, sedangkan Kinerja Keuangan berpengaruh positif pada Belanja Daerah dan IPM. Kemudian Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh pada IPM di Pemerintah Provinsi Bali, namun Belanja Daerah berpengaruh positif pada IPM. Hasil pengujian mediasi menunjukkan bahwa Belanja Daerah mampu memediasi hubungan antara Kinerja Keuangan terhadap IPM, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memediasi pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap IPM.

5. Firda Rizky Amalia dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia”. Penelitian menggunakan analisis rasio keuangan dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM kabupaten/kota di provinsi Bali tahun 2008-2012. Sedangkan secara simultan Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja berpengaruh signifikan terhadap IPM kabupaten/kota di provinsi Bali tahun 2008-2012.
6. Hendra Mizkan, Kamaliah dan Restu Agusti (2015) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Pekanbaru”. Penelitian ini

menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan, aktivitas keuangan, efektivitas, efisiensi dan tingkat pertumbuhan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru. Sedangkan tingkat kemampuan, aktivitas keuangan, efektivitas, efisiensi dan tingkat pertumbuhan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru.

7. Ida Ayu Candra Yunita Sari dan Ni Luh Supadami (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 9 kabupaten/kota yang terdapat di wilayah Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan pada Peningkatan IPM dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan pada Peningkatan IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
8. Paramitha Sandy Mokodompit, Sifrid S. Pangemanan, dan Inggriani Elim (2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan desentralisasi kota Kotamobagu pada tahun anggaran 2011 dan 2012 masih sangat rendah yang berarti masih belum mampu mewujudkan proses desentralisasi. Keuangan kota Kotamobagu masih bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah kota Kotamobagu pada tahun 2011 dan 2012 masih sangat rendah.

9. I Made Aditya Pramatha dan A.A.N.B. Dwirandra (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, Dan Investasi Swasta Terhadap Indeks Pembangunan Manusia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dan investasi swasta berpengaruh positif signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
10. Hastu Sarkoro dan Zulfikar (2016) melakukan penelitian dengan judul “Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2012-2014)”. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 33 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IPM dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Kemudian Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM.
11. Riva Ubar Harahap (2011) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara”. Dari kriteria sampel yang dipilih hanya 25 kabupaten/kota di propinsi Sumatera Utara yang menjadi sampel. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan DBH secara parsial tidak

berpengaruh terhadap IPM. Sedangkan DAU, DAK, dan DBH secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM.

12. Risma Niswaty, Johanna Mano dan Haedar Akib (2015) melakukan penelitian dengan judul "*An Analysis Of The Public Service Performance Based On Human Development Index In Makassar City, Indonesia*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah Indeks Pembangunan Manusia merupakan proksi yang ideal untuk mengukur kinerja pemerintah daerah, termasuk kota Makassar, berdasarkan hasil pengolahan data, kinerja pelayanan publik dari pemerintah Kota Makassar cukup baik, tetapi diharapkan tidak membuat pemerintah kota cepat puas tetapi digunakan sebagai pemicu untuk berkinerja lebih baik di masa depan.
13. Freska Gousario dan Christiana Fara Dharmastuti (2015) melakukan penelitian dengan judul "*Regional Financial Performance And Human Development Index Based On Study In 20 Counties/Cities of Level 1 Region*". Penelitian ini dilakukan di 20 kabupaten/kota di wilayah tingkat I. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, Rasio Efisiensi PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, dan Rasio Belanja Harmoni Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif terhadap IPM.
14. Jumadi, M. Pudjiharjo, Ghazali Maski, dan Moh Khusaini (2013) melakukan penelitian dengan judul "*The Impact of Fiscal Decentralization on Local*

Economic Depelopment in East Java". Sampel dalam penelitian ini adalah 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan alat analisis statistik SEM (*Structural Equation Modeling*) untuk mengidentifikasi pengaruh desentralisasi fiskal, pembangunan manusia, pembangunan fisik dan faktor-faktor input terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Manusia dan menunjukkan efek negatif antara Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal.

15. Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2015) melakukan penelitian dengan judul "*Empirical Study About The Interaction Between Equalization Funds, Regional Financial and Human Development Index In Regional Economic*". Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan memiliki efek langsung negatif terhadap kapasitas fiskal, kapasitas fiskal memiliki efek langsung positif terhadap mandiri secara finansial, kapasitas fiskal tidak memiliki pengaruh langsung negatif terhadap struktur pemerintah daerah pengeluaran, ketergantungan finansial berpengaruh langsung positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketergantungan finansial efek langsung positif pada struktur pengeluaran pemerintah daerah, dan struktur pemerintah daerah pengeluaran memiliki efek langsung negatif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sejalan dengan uraian di atas, penelitian yang dilakukan pada dasarnya merujuk pada penelitian sebelumnya dengan memiliki persamaan dan perbedaan antara lain:

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Penerbit
1. Eka Marisca Harliyani dan Haryadi (2016) Judul penelitian: Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi	Variabel Independen: Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Terhadap Rasio Efektivitas PAD	Variabel Independen: Rasio Keserasian Belanja Langsung, Rasio Efisiensi PAD	Rasio derajat desentralisasi dan keserasian belanja langsung positif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan rasio ketergantungan keuangan daerah, efektivitas PAD dan efisiensi PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.	Jurnal ISSN: 2338-4603 Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 3 No. 3, (2016).
2. Desi Handayani dan Fera Sriyunianti (2016) Judul Penelitian: Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota Di Sumatera Bagian Tengah	Variabel Independen: Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD	Tempat penelitian	Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Sedangkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh	Jurnal ISSN: 2541-111x, (2016). <i>National Conference of Applied Sciences, Engineering, Business and Information Technology.</i> Politeknik Negeri Padang

				signifikan terhadap IPM.	
3. Kartika Berliani (2016). Judul Penelitian: Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka	Variabel Independen: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD	Variabel Independen: Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Keserasian Belanja Daerah	Variabel Intervening: Pertumbuhan Ekonomi	Secara parsial variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	Jurnal ISSN: 1412-6907 Jurnal Indonesia Membangun Vol. 15 No. 2, (2016).
4. Luh Dini Yasintha Dwiyandari dan I Dewa Nyoman Badera (2018). Judul penelitian: Pengaruh Kinerja Keuangan pada Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya pada Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Independen: Kinerja Keuangan dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas PAD	Variabel Intervening: Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi	Tempat Penelitian	Kinerja keuangan tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan kinerja keuangan berpengaruh positif pada belanja daerah dan IPM. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada IPM namun belanja daerah berpengaruh positif pada IPM.	Jurnal ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 22 No. 3, (2018).
5. Firda Rizky Amalia dan Ida Bagus Putu	Variabel Independen: Rasio	Variabel Independen: Rasio		Secara parsial Kemandirian Keuangan	Jurnal ISSN: 2302-0178 E-Jurnal EP

Purbadharmaja (2014). Judul Penelitian: Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keresasian Alokasi Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Keresasian Alokasi Belanja Tempat Penelitian	Daerah dan Keresasian Alokasi Belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan secara simultan Kemandirian Keuangan Daerah dan Keresasian Alokasi Belanja berpengaruh signifikan terhadap IPM.	Universitas Udayana Vol. 3 No 6, (2014).
6. Hendra Mizkan, Kamaliah dan Restu Agusti (2015). Judul Penelitian: Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru	Variabel Independen: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD	Variabel Independen: Rasio Kemampuan, Rasio Aktivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan. Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan Tempat Penelitian	Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan Variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	Jurnal ISSN: 1907-364X Jurnal SOROT, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau Vol. 10 No. 1, (2015).
7. Ida Ayu Candra Yunita Sari dan Ni Luh Supadami (2016). Judul Penelitian: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Dependen: PAD Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Variabel Independen: Belanja Modal. Tempat Penelitian	Secara parsial PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan pada peningkatan IPM, dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan pada peningkatan IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.	Jurnal ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 15 No. 3, (2016).
8. Paramitha Sandy Mokodompit, Sifrid Pangemanan,	Variabel: Kinerja Keuangan Pemerintah dengan Rasio	Tempat penelitian	Kemampuan desentralisasi kota Kotamobagu pada tahun	Jurnal ISSN: 2303-1174 Jurnal EMBA Vol. 2 No. 2, (2014).

dan Inggriani Elim (2014). Judul Penelitian: Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu	Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah		anggaran 2011 dan 2012 masih sangat rendah yang berarti masih belum mampu mewujudkan proses desentralisasi. Keuangan kota Kotamobagu masih bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah kota Kotamobagu pada tahun 2011 dan 2012 masih sangat rendah.	
9. I Made Aditya Pramartha dan A.A.N.B. Dwirandra, 2018. Judul Penelitian: Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan Investasi Swasta Terhadap p Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Independen: Desentralisasi fiskal Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Variabel Independen: Belanja modal, Investasi swasta Tempat Penelitian	Desentralisasi fiskal dan investasi swasta Berpengaruh positif signifikan pada IPM. Sedangkan Belanja modal tidak berpengaruh pada IPM.	Jurnal ISSN 2302-8556 E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 22 No. 3, (2018).
10. Hastu Sarkoro dan Zulfikar (2016). Judul Penelitian: Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se- Indonesia	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Variabel Independen: PAD, DAU, DAK Tempat Penelitian	Secara parsial PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan Belanja Daerah, DAU, DAK dan PAD secara simultan berpengaruh	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta Vol. 1 No. 1, (2016).

Tahun 2012-2014)				signifikan terhadap IPM.		
11.	Riva Harahap (2011). Judul Penelitian: Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Variabel Independen: DAU, DAK, DBH Tempat Penelitian	DAU, DAK, dan DBH secara parsial tidak berpengaruh terhadap IPM. Sedangkan DAU, DAK, dan DBH secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM.	Jurnal Riset dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Vol. 11 No. 1, (2011).
12.	Risma Niswaty, Johanna Mano dan Haedar Akib (2015). Judul Penelitian: <i>An Analysis Of The Public Service Performance Based On Human Development Index In Makassar City, Indonesia</i>	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Variabel Independen: Pelayanan Publik Tempat Penelitian	Kinerja pelayanan publik dari pemerintah Kota Makassar cukup baik, tetapi diharapkan tidak membuat pemerintah kota cepat puas tetapi digunakan sebagai pemicu untuk berkinerja lebih baik di masa depan.	I J A B E R,	Vol. 13 No. 6, (2015): 4395-4403
13.	Freska Gousario dan Christiana Fara Dharmastuti (2015). Judul Penelitian: <i>Regional Financial Performance And Human Development Index Based On Study In 20 Counties/Citie sof Level 1 Region</i>	Variabel Independen: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas PAD Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Variabel Independen: Rasio Efisiensi PAD, Rasio Belanja Tempat Penelitian	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, dan Rasio Belanja Harmoni Keuangan tidak berpengaruh	<i>Journal The WINNERS</i> , Vol. 16 No. 2, (2015): 152-165	

				signifikan terhadap IPM.	
14. Jumadi, M. Pudjiharjo, Ghozali Maski, dan Moh Khusaini (2013). Judul Penelitian: <i>The Impact of Fiscal Decentralization on Local Economic Development in East Java</i>	Variabel: Desentralisasi Fiskal (Rasio Derajat dan Pembangunan Manusia)	Variabel: Pertumbuhan Ekonomi Tempat Penelitian	Adanya pengaruh positif dan signifikan antara Desentralisasi Fiskal terhadap Manusia dan menunjukkan efek negatif antara Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.		<i>IOSR Journal Of Humanities And Social Science</i> , Vol. 13 No. 1 (Jul. - Aug. 2013), PP 01-07 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845
15. Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2015). Judul Penelitian: <i>Empirical Study About The Interaction Between Equalization Funds, Regional Financial and Human Development Index In Regional Economic</i>	Variabel Dependensi: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Variabel Independensi: Dana Perimbangan Variabel Intervening: Kapasitas Fiskal, Kemandirian Fiskal dan Struktur Pengeluaran Pemerintah Daerah Tempat Penelitian	Dana Perimbangan memiliki efek langsung negatif terhadap kapasitas fiskal, kapasitas fiskal memiliki efek langsung positif terhadap mandiri secara finansial, kapasitas fiskal tidak memiliki pengaruh langsung negatif terhadap struktur pemerintah daerah pengeluaran, ketergantungan finansial berpengaruh langsung positif pada IPM ketergantungan finansial efek langsung positif pada struktur pengeluaran pemerintah daerah, dan struktur pemerintah daerah pengeluaran memiliki efek langsung negatif pada IPM.		<i>International Journal of Economics and Finance</i> , Vol. 7 No. 1 (2015) ISSN 1916-971X E-ISSN 1916-9728 <i>Published by Canadian Center of Science and Education</i>

Rizka Amalia (2020) Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya).

Berdasarkan atas uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Periode 2004-2018)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Keuangan (Derajat Desentralisasi, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Efektivitas Pajak Daerah) dan Pembangunan Manusia di Pemerintahan Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana Pengaruh Kinerja Keuangan (Derajat Desentralisasi, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Efektivitas Pajak Daerah) terhadap Pembangunan Manusia secara parsial pada Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Bagaimana Pengaruh Kinerja Keuangan (Derajat Desentralisasi, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Efektivitas Pajak Daerah) terhadap Pembangunan Manusia secara simultan pada Pemerintah Kota Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Kinerja keuangan (Derajat Desentralisasi, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Efektivitas Pajak Daerah) dan Pembangunan Manusia di Pemerintahan Kota Tasikmalaya.
2. Pengaruh Kinerja Keuangan (Derajat Desentralisasi, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Efektivitas Pajak Daerah) terhadap Pembangunan Manusia secara parsial pada Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Pengaruh Kinerja Keuangan (Derajat Desentralisasi, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Efektivitas Pajak Daerah) terhadap Pembangunan Manusia secara simultan pada Pemerintah Kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang baik dan juga berguna serta relevan yang dapat dimanfaatkan:

1. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pembangunan manusia.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah serta meningkatkan pembangunan manusia khususnya Pemerintah Kota Tasikmalaya.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para investor untuk memberikan dana kepada daerah yang benar-benar membutuhkan dan referensi bagi peneliti lain yang berkemungkinan mengambil subjek sejenis dalam melakukan penelitian dimasa mendatang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Letnan Harun No. 1 Kota Tasikmalaya dan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan alamat website www.bps.go.id.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, sebagaimana tersusun dalam matriks kegiatan penelitian terlampir.